

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika didirikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengembangan e-Governemnt, Persandian dan Statistik Daerah dan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, pembinaan, dan pengawasan mitra serta Kesekretariatan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kabupaten Manggarai Barat. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, Ramah, Cepat dan Tepat”**. Untuk mewujudkannya dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Membina secara efektif Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui SIMDA yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kabupaten Manggarai Barat.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMDA-BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansian

Dinas Komunikasi dan Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kabupaten Manggarai Barat/Lembaga dan Bendahara Umum Daerah.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester

selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

1. Pendapatan Rp. 250.000.000,00

Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar **Rp. 250.000.000,00** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 185.528.000,00** atau 92,76%, yang terdiri dari :

1.1 Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 85.161.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah Dinkominfo telah direalisasikan sebesar Rp. **85.161.000,00** atau 34,06% terhadap anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 yang terdiri dari:

1.1.1 Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 85.161.000,00 atau 34,06% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	85.161.000,00	34,06%
	Jumlah	250.000.000,00	85.161.000,00	34,06%

1.1.2 Retribusi Perijinan Tertentu

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 tidak memiliki Retribusi Perijinan Tertentu selain Retribusi Umum.

1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 tidak memiliki pendapatan daerah lain yang sah selain Retribusi.

B.2. BELANJA

Total Belanja Perangkat Daerah telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 5.837.037.149,00** atau **94,09%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 6.203.348.619,00** Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	BELANJA	6.203.348.619,00	5.837.037.149,00	94,09
1.	BELANJA OPERASI	5.905.277.187,00	5.548.568.784,00	93,96
	a. Belanja Pegawai	2.056.286.236,00	2.008.789.544,00	97,69
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.848.990.951,00	3.539.779.240,00	91,97
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.	BELANJA MODAL	298.071.432,00	288.468.365,00	96,78
	a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.071.432,00	288.468.365,00	96,78
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.203.348.619,00	5.837.037.149,00	94,09

B.3 BELANJA PEGAWAI

B.3.1. Belanja Pegawai

Rp. 2.056.286.236,00

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 2.008.789.544,00 atau 97,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.056.286.236,00 Belanja pegawai tersebut terdiri dari:

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Belanja Pegawai			
1.	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.546.440.000	1.537.543.609	99,42
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	368.699.583	330.099.282	89,53
3.	Insentif Retribusi Daerah	9.276.653	9.276.653	100,00
4.	Honorarium PNS	131.870.000	131.870.000	100,00
	Sub Jumlah A	2.056.286.236	2.008.789.544	97,69

B.4 BELANJA BARANG DAN JASA

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar **Rp. 3.539.779.240,00** atau 91,97% dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 3.848.990.951,00** Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Pakai Habis	183.098.050	160.386.852	87,60
2	Belanja Jasa Kantor	2.794.437.901	2.515.538.709	90,02
3	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.800.000	1.286.568	71,48
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan MPemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.000.000	102.925.197	99,93
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	321.000.000	320.475.000	99,84
6	Belanja Perjalanan Dinas	445.655.000	439.166.914	98,54
	TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA	3.848.990.951	3.539.779.240	91,97

☞ Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 439.166.914,00** atau 98,54% dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 445.655.000,00**. Belanja Perjalanan Dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.500.000	83,33
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.430.000	2.260.000	65,89
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.430.000	4.130.000	93,23
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.880.000	16.832.627	99,72

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	109.560.000	109.311.668	99,77
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	47.475.000	46.940.000	98,87
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	46.730.000	46.480.000	99,47
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pengelolaan Media Komunikasi Publik	29.410.000	29.409.200	100
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11.310.000	10.575.000	93,5
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4.560.000	3.530.000	77,41
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.210.000	12.180.000	99,75
12	Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	37.900.000	37.289.392	98,39
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.000.000	4.700.000	94
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	17.740.000	17.573.000	99,06
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	6.455.000	6.220.000	96,36
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	31.655.000	31.560.000	99,7
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2.000.000	1.790.000	89,5
18	Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12.930.000	12.706.380	98,27
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.700.000	5.700.000	100
20	Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.480.000	38.479.647	100
Total		445.655.000	439.166.914	98,5

B.5 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja Modal tahun 2022 telah direalisasikan sebesar **Rp. 288.468.365,00** atau 96,78% dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 298.071.432,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.071.432	288.468.365	96,78
	TOTAL BELANJA MODAL	298.071.432	288.468.365	96,78

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.006.274	24.003.500	82,75
2	Belanja Modal Mebel	6.893.300,00	6.800.000	98,65
3	Belanja Modal Alat Pendingin	9.551.300,00	6.264.865,00	65,59
4	Belanja Modal Personal Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	100
5	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.370.558,00	7.150.000,00	97,01
6	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	160.000.000,00	159.000.000,00	99,38
7	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	30.000.000,00	100
8	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.250.000,00	2.250.000,00	100
9	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	100
10	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	15.000.000,00	100
11	Belanja Modal Personal Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	100
	TOTAL BELANJA MODAL	298.071.432	288.468.365	96,78

B.6. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Tahun 2022 tidak terdapat anggaran belanja modal gedung dan bangunan sehingga realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 adalah nihil.

B.7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Tahun 2022 tidak terdapat anggaran belanja jalan, irigasi dan jaringan sehingga realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 adalah nihil.

B.8. SURPLUS/(DEFISIT)

Dari realisasi pendapatan sebesar **Rp 85.161.000,00** dikurangi realisasi belanja daerah sebesar **Rp 5.837.037.149,00**, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 mengalami Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp.-5.751.876.149,00**.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. ASET LANCAR****C.2.a. Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 adalah Rp.0 atau nihil.

C.1.b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan 31 Desember 2022 Rp.0 atau nihil.

C.2.c. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 adalah Rp.0 atau nihil.

C.3.d. Kas Lainnya

Tidak terdapat saldo Kas lainnya untuk tahun 2022.

C.4.e. Setara Kas

Tidak terdapat saldo Setara Kas untuk tahun 2022.

C.4.f. Kas JKN

Tidak terdapat saldo Kas JKN untuk tahun 2022.

C.4.g. Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat saldo investasi jangka pendek untuk tahun 2022.

C.5.h. Piutang Pendapatan

Tidak terdapat Piutang Pendapatan tahun 2022.

C.6.i. Piutang Lainnya

Tidak terdapat Saldo Piutang Lainnya untuk tahun 2022

C.6.j. Penyisihan Piutang

Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang untuk tahun 2022

C.6.k. Beban Dibayar Dimuka

Tidak terdapat Saldo Beban Dibayar Dimuka untuk tahun 2022

C.7.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 62.000,- seperti yang disajikan dalam lampiran laporan ini, saldo persediaan merupakan saldo hasil perhitungan sisa barang yang belum digunakan pada OPD.

C.2. ASET TETAP

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar **Rp. 2.491.412.830,00** dan **Rp. 2.618.932.367,00** Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

C.2.a. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. **591.414.000,00** dan Rp. **580.554.000,00**

Saldo Awal Tahun 2022	580.554.000
Belanja Modal (LRA)	-
Belanja Non Modal	
Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	10.860.000
Mutasi Kurang	
Aset Tetap yang dihapuskan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	591.414.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	591.414.000

C.2.b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah **Rp. 2.991.454.122,00 dan Rp. 2.702.985.757** Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1	Saldo awal 2022	2.702.985.757
2	Belanja Modal 2022 LRA	288.468.365
3	Mutasi Tambah Non Belanja Modal 2022	
4	Hibah	
5	Jumlah Penambahan	288.468.365
6	Mutasi Pengurangan 2022	
7	Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	
8	Jumlah pengurangan	2.194.305.420
	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	2.194.305.420
9	Saldo per 31 Desember 2022 (1+5-8)	797.148.702

Penjelasan :

- Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari Belanja Modal (LRA) berupa:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.006.274	24.003.500	82,75
2	Belanja Modal Mebel	6.893.300,00	6.800.000	98,65
3	Belanja Modal Alat Pendingin	9.551.300,00	6.264.865,00	65,59
4	Belanja Modal Personal Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	100
5	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.370.558,00	7.150.000,00	97,01
6	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	160.000.000,00	159.000.000,00	99,38
7	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	30.000.000,00	100
8	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.250.000,00	2.250.000,00	100
9	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	100
10	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	15.000.000,00	100
11	Belanja Modal Personal Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	100
TOTAL BELANJA MODAL		298.071.432	288.468.365	96,78

C.2.c. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah **Rp. 1.234.594.750,00** Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal tahun 2022	1.234.594.750
Mutasi tambah:	
Belanja Modal (LRA)	-
Belanja Non Modal	-
Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	
belanja Barang dan Jasa	
Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi)	
Mutasi kurang:	-
Aset Tetap yang dihapuskan	-
Saldo per 31 Desember 2022	1.234.594.750
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	239.194.643
Nilai Buku per 31 Desember 2022	995.400.107

C.2.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.196,855,000.00**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo awal Tahun 2022	196.855.000
Mutasi Tambah :	-
Belanja Modal 2022(LRA)	0,00
Belanja non Modal	0,00
Pindahan dari KDP	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	196.855.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	89.404.979
Nilai Buku per 31 Desember 2022	107.450.021

C.2.e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0.

C.2.f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing **Rp. 2.522.905.042,00** dan **Rp. 2.096.057.140,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
			(Kenaikan/ Penurunan)	
1	Tanah	591.414.000	-	591.414.000
2	Peralatan dan Mesin	2.991.454.122	2.194.305.420	797.148.702
3	Gedung dan Bangunan	1.234.594.750	239.194.643	995.400.107
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	196.855.000	89.404.979	107.450.021
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		5.014.317.872	2.522.905.042	2.491.412.830

C.3. ASET LAINNYA**C.3.a. Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah **Rp. 48.890.150,00**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo awal Tahun 2022	714.958.874
Mutasi tambah:	
Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya	
Mutasi kurang:	
Aset Lainnya yg dihapuskan	
Saldo per 31 Desember 2022	714.958.874
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	666.068.724
Nilai Buku per 31 Desember 2022	48.890.150

- Penambahan Aset Lainnya tahun 2022 Rp. 0,00 diperoleh dari asset tetap yang dipindahkan ke asset lainnya.
- Pengurangan Aset Lainnya dari Aset Lainnya adalah sebesar Rp. 666.068.724,00 (akumulasi penyusutan asset lainnya)
- Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4. KEWAJIBAN

C.4.a. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 adalah **Rp. 92.657.000,00** yang terdiri dari utang beban senilai **Rp. 37.000,00** dan Utang Jangka Pendek Lainnya senilai **Rp. 92.620.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Honorarium Tim Sekretariat Satu Data	Rp. 6.220.000
Honorarium Forum Satu Data	Rp. 21.000.000
Belanja Jasa Implementasi Platform Analisa Sosial Media 2 bulan	Rp. 17.600.000
Belanja Jasa Implementasi Platform Satu Data	
- Basic Big Data (Manadatory Package) 2 bulan	Rp. 7.400.000
- Basic Naremetal Clud (Mandatory Package) 2 bulan	Rp. 11.000.000
- Dasbord Satu Data - 1 (Dashbord Builder) 2 bulan	Rp. 11.000.000
- Integrasi Satu Data-1 (Fle Server Management) 2 bulan	Rp. 11.000.000
Total	Rp.92.620.000

C.4.b. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah NIHIL.

C.5. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.411.852.830,00** dan **Rp. 2.680.830.892,00** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional**D.1. Pendapatan**

Pendapatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 96.021.000,00**.

No. Urut	Uraian	Saldo 2022
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	85.161.000
2	Pendapatan retribusi Daerah-LO	85.161.000
3	Lain -lain Pendapatan Yang Sah-LO	10.860.000
4	Pendapatan Hibah-LO	10.860.000
	JUMLAH PENDPATAN-LO 1+3	96.021.000

D.2. Beban

Jumlah Beban pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 6.067.985.061,00** dan **Rp 4.781.942.484,00**

Adapun rincian Beban adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
9	BEBAN	6.067.985.061	4.781.942.484
9 . 1	BEBAN OPERASI	6.067.985.061	4.781.942.484
9 . 1 . 1	Beban Pegawai	2.008.789.544	1.440.778.696
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	160.389.852	187.845.650
9 . 1 . 2	Beban Jasa	2.609.390.652	2.323.144.315
9 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	423.400.197	114.096.164
9 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	439.166.914	284.588.171
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	426.847.902	431.489.488

D.2.a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.008.789.544,00** dan **Rp. 1.440.778.696,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.2.b. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 160.389.852,00** dan **Rp. 187.845.650,00**.

D.2.c. Beban Jasa

Jumlah Jasa pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.609.390.652,00** dan **Rp. 2.323.144.315,00**.

D.2.d. Beban Pemeliharaan

Jumlah beban pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing **Rp. 423.400.197,00** dan **Rp. 114.096.164,00**. Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan mesin.

D.2.d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban perjalanan dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing **Rp. 439.166.914,00** dan **Rp. 284.588.171,00**. Beban Perjalanan Dinas adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan baik dalam maupun luar daerah.

D.2.c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 426.847.902,00** dan **Rp. 431.489.488,00**.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.680.830.892,00** dan **Rp. 2.892.259.755,00**

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah **RP. (5.971.964.061,00)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 0,00**.

E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00.

E.5. Koreksi ekuitas lainnya

Koreksi pencatatan Koreksi ekuitas lainnya untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp.48.890.150,00,-** dan **Rp. 0**

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.411.852.830,00** dan **Rp. 2.680.830.892,00**

F. Pengungkapan Lain-lain

Sesuai Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.954/PPKD/4/I/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 Tanggal 13 Januari 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Pengelola Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

Pejabat Pengnelola Keuangan
Dinas komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2022

NO	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan SKPD	Jabatan Struktural Nama/NIP
1	2	3
1	Pengguna Anggaran	Nama : Paukus Setahu, S. Sos NIP : 196806292000121004 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK Dinkominfo)	Nama : Dewi Widiанти, S. Kom NIP : 19810517 200904 2 003 Jabatan : Kasubag Penyusun Program Keuangan dan Pelaporan
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo)	Nama : Hildegunda Kartini Tulus, ST NIP : 19790420 200501 2 010 Jabatan : Sekretaris
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo)	Nama : Teobaldus Landi Julita, S. Sos NIP : 197507012007011025 Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi public

NO	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan SKPD	Jabatan Struktural Nama/NIP
1	2	3
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo)	Nama : Tarsisius Cai, S. TP NIP : 197407252001121003 Jabatan : Kepala Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika
6	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo)	Nama : Alfonsa LH. Ndagu, S. Si NIP : 197308022000122004 Jabatan : Kepala Bidang Data dan Statistik Sektoral
7	Bendaharawan Pengeluaran	Nama : Ikang Fawzinilhak, S. IP NIP : 198702042010011009
8	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	Nama : Lusia Lumbur, A.Md NIP : 19710901 201101 2 002
9	Bendaharawan Penerimaan	Nama : Veronika Ledis Nuer NIP : 19830607 200701 2 006

Labuan Bajo, tanggal 31 Desember 2022

q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat A



Paulus Setahu, S. Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196806292000121004